

NASIONALISASI PABRIK GULA MOJO DI SRAGEN TAHUN 1950-1967

Oleh: Romadhon Roba'i
13407144004

Abstrak

Pabrik gula merupakan sebuah industri besar di Indonesia yang telah di bangun masa VOC. Pabrik gula terus mengalami perkembangan pada masa Pemerintah Kolonial Belanda dan mengakibatkan gula menjadi salah satu komoditas penting dalam kegiatan ekspor. Besarnya ekspor gula sangat berpengaruh terhadap perekonomian Hindia Belanda hingga sampai pada masa kemerdekaan. Hal ini yang mengakibatkan pabrik gula menjadi sektor penting yang menjadi bagian dari upaya nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Perkembangan yang baik yang dialami oleh pabrik gula Mojo di Sragen terjadi pada masa pengelolaan pihak Kolonial Belanda. Terjadinya depresi ekonomi membuat keberadaan pabrik gula Mojo mengalami masalah dalam produksi dan menjadi awal kemunduran pergulaan masa pemerintahan Belanda. Namun demikian pabrik gula masih menjadi sektor penting dalam perekonomian.

Pada akhir tahun 1957 menjadi awal nasionalisasi perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia. Hal ini diawali dari kaum buruh yang berhasil menduduki perusahaan Belanda yang berada di Jakarta. Tindakan nasionalisasi yang dilakukan pemerintah memberi dampak bagi pabrik gula. Dampak yang ditimbulkan berupa adanya perubahan sistem *manajemen* pabrik dan kemampuan pekerja dalam menjalankan aktivitas produksi terutama yang berkaitan dengan pemahaman tentang mesin penggiling. Setelah nasionalisasi, pabrik gula Mojo berada dalam pengawasan pemerintah di bawah Menteri Pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pabrik gula Mojo di Sragen pada masa pemerintahan Belanda dan setelah adanya nasionalisasi pemerintah.

Kata kunci: *Nasionalisasi, Pabrik gula Mojo, Sragen.*

NATIONALIZATION OF MOJO SUGAR FACTORY IN SRAGEN ON 1950-1967

By: Romadhon Roba'i
13407144004

Abstract

Sugar production was one of the largest Indonesia's industry sector in the VOC period. Sugar factories were in a rapid development in the Dutch Colonial Government. Therefore, sugar production became an important commodities in export activities. Sugar-exporting was very influential to the Dutch East Indies economy until the independence. That made the sugar factories becoming an important sector that part of the nationalization efforts undertaken by the government. The development experienced by the Mojo Sugar Factory in Sragen occurred during the management of the Dutch Colonials. The occurrence of economic depression makes the existence of Mojo Sugar Factory got some problems in production and became the beginning of deterioration of sugar production in Dutch government reign. However, sugar mills remain an important sector in the economy.

At the end of 1957 nationalization was began to be applied to Dutch-owned companies in Indonesia. This started from the workers who succeeded in occupying the Dutch company in Jakarta. The government's nationalization actions have an impact on the sugar mills. The result of nationalization is a change in plant management system and the ability of workers in carrying out production activities, especially related to the understanding of the grinding machine. After the nationalization, Mojo sugar factory now is handled under the Minister of Agriculture. This study aims to determine the condition of the sugar factory in Sragen mojo Dutch government and after the nationalization of the government.

Keywords: *Nationalization, Mojo sugar factory, Sragen.*

A. Pendahuluan

Puncak kegemilangan perkebunan tebu dicapai pada tahun-tahun awal 1920an, dengan 179 pabrik pengolahan dan produksi tiga juta ton gula per tahun. Ekspor gula dari Pulau Jawa pada saat itu merupakan seperempat dari penghasilan Belanda, sehingga selama puluhan tahun, gula di Pulau Jawa diibaratkan sebagai “gabus tempat pulau Jawa mengapung” yang mengandung arti bahwa perekonomian Kolonial Belanda berpusat di Jawa. Akan tetapi, jumlah produksi terus turun akibat depresi ekonomi yang melanda dunia pada tahun 1930an, dan jumlah pabrik gula pun berkurang menjadi 51 pada tahun 1956. Pada akhir tahun 1957 semua pabrik gula dinasionalisasi dan pemerintah sangat meregulasi industri ini.¹

Memasuki masa kemerdekaan, pengaruh perekonomian yang diberikan oleh pemerintahan Belanda tidak bisa dilepaskan oleh Indonesia. Kemerdekaan yang di proklamasikan oleh Soekarno Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak diakui oleh pihak Belanda. Belanda mengakui kedaulatan RI yaitu pada tahun 1949, setelah peristiwa tersebut Belanda baru mengakui bahwa Indonesia sudah merdeka. Meskipun Indonesia sudah merdeka, tetapi perekonomian di Indonesia masih dikelola oleh Belanda. Perekonomian atau perusahaan yang dikuasai oleh Belanda di antara lain dalam sektor industri, perkebunan, kereta api dan lainnya.

Pada masa kemerdekaan, Indonesia memperbaiki di segala bidang termasuk bidang ekonomi. Perbaikan perekonomian nasional muncul pada tahun 1951 oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Beliau berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangun ekonomi baru. Langkah yang perlu dilakukan ialah mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.² Pada masa Kabinet Natsir, Dr. Sumitro Djojohadikusumo beliau menjabat sebagai menteri perindustrian dan perdagangan. Ia menyebut istilah ekonomi nasional. Hal ini sesuai dengan salah

¹ Lina Farida, “Pabrik Gula Cempiring Kendal Pasca Nasionalisasi Tahun 1957-2008”, *Journal of Indonesian History*, (Vol. 3, No. 1, tahun 2014), hlm. 35.

² Marwati Djoened Pusponagoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 30.

satu program yang terdapat dalam Kabinet Natsir, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat sebagai dasar untuk melaksanakan ekonomi nasional yang sehat.³ Pada Kabinet-kabinet selanjutnya, upaya untuk membangun ekonomi nasional tidak banyak disinggung lagi. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidak stabilan dalam pemerintahan. Nasionalisasi ekonomi kembali disuarakan pada tahun 1957, pada masa Kabinet Juanda yang berkuasa. Pada masa Kabinet Juanda membuat program untuk merebut kembali wilayah Irian Barat dari tangan Belanda.

Usaha Indonesia untuk membangun perekonomian semakin serius pada akhir tahun 1957. Pada akhir tahun 1957 Indonesia berupaya menasionalisasi semua pabrik-pabrik Belanda yang ada di Indonesia. Nasionalisasi pabrik-pabrik dibantu oleh militer Indonesia pada saat itu yang dikenal sangat tangguh, nasionalisasi di mulai dari pusat dan menuju ke daerah-daerah. Tidak terkecuali perusahaan gula yang berada di Sragen. Pabrik Gula Mojo yang terdapat di daerah Sragen tidak lepas dari peristiwa nasionalisasi yang terjadi pada tahun 1957.

B. Berdirinya Pabrik Gula Mojo di Sragen

Sragen sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Ibukotanya terletak di Sragen, sekitar 30 km sebelah timur Kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Grobogan di utara, Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Karanganyar di selatan, serta Kabupaten Boyolali di bagian barat. Kabupaten Sragen ini dikenal dengan sebutan "Bumi Sukowati".⁴ Nama Bumi Sukowati ialah nama yang digunakan sejak masa kekuasaan Kerajaan (Kasunanan) Surakarta. Secara geografis Sragen merupakan wilayah yang berada di pedalaman dan memiliki potensi dalam bidang pertanian dan perkebunan.

³ Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 128.

⁴ Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Sragen dan Tim Peneliti Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret Surakarta, *Sejarah dan Hari Jadi Pemerintahan di Kabupaten Sragen*, Sragen: Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Sragen, 1987, hlm. 76.

Pabrik gula Mojo yang terletak di jantung kota Sragen merupakan satu-satunya pabrik gula di Sragen yang beroperasi sampai saat ini. Pabrik Gula Mojo ini merupakan salah satu diantara pabrik yang bernaung dibawah PTP XV- XVI (PERSERO) hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1991. Pabrik gula mojo didirikan pada tahun 1883 oleh CV Cultuur Maschappy Lawoe, pada tahun 1892 diganti oleh NV Cultuur Verenigde Lawoe Obdeming dan kemudian diganti lagi oleh NV Miradolk & Cc, yang mana ketiganya ini ialah orang Belanda. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian tentang penguasaan perusahaan perkebunan/pertanian milik Belanda yang akan diawasi dibawah Pemerintah Indonesia.

Tugas administrator ialah Mengkoordinasi dan memimpin staf serta karyawan pabrik gula Mojo. Adanya struktur organisasi ini maka tugas karyawan pabrik gula Mojo jelas apa tugas dan tanggung jawabnya. Pabrik gula Mojo membagi karyawannya menjadi 3 kelompok yaitu: 1. karyawan pimpinan, 2. karyawan pelaksana, 3. karyawan musiman.⁵ Karyawan pimpinan terdiri dari admistratur, kepala tanaman, kepala pabrik, kepala pengolahan dan PUK. Masing-masing kepala membawahi karyawan pelaksana yang berada dalam tingkat 2 dalam struktur organisasi. Karyawan tingkat dua seperti mandor, bagian pengolahan tebu dll. Susunan terakhir karyawan dalam pabrik pabrik ialah karyawan musiman. Karyawan musiman ialah mereka yang bekerja dalam pabrik hanya masa giling dan tebang (panen), masa giling pabrik biasanya dimulai pada bulan Mei.

C. Nasionalisasi Pabrik Gula Mojo

Proses nasionalisasi atau pengambil alihan pabrik ini diawali dengan melakukan berbagai cara. Langkah-langkah pertama yang dilakukan dimulai sejak tahun 1951 dengan melakukan upaya mempertahankan kemerdekaan secara politis. Akibat dari itu defisit anggaran belanja semakin besar. Masalah ini

⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

menambah persoalan ekonomi Indonesia dalam periode 1951-1955.⁶ Persoalan ekonomi ini ditandai dengan tingkat produksi gula Indonesia untuk tahun 1952 dan 1953 masing-masing berada pada tingkat 60% dan 80% dari tingkat produksi tahun 1938.⁷

Proses nasionalisasi pabrik gula Mojo Sragen baru dilakukan satu tahun kemudian. Peristiwa nasionalisasi pabrik gula Mojo yakni pada tanggal 10 Desember 1958. Pengambilalihan perusahaan Belanda diawasi langsung oleh TNI AD. TNI dalam hal ini berkedudukan sebagai penguasa di daerah atas nama pemerintahan pusat. A.H Nasution selaku kepala staff Angkatan Darat (AD) yang menghimbau agar perusahaan yang sudah dinasionalisasi segera diambil alih oleh kekuasaan TNI. Seruan ini merupakan tindakan antisipasi agar perusahaan yang telah berhasil dinasionalisasi tidak jatuh ke tangan komunis.⁸ Tindakan ini awal mula TNI masuk kedalam struktur pabrik-pabrik gula di Indonesia.

Nasionalisasi perusahaan gula Mojo Sragen berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.3 tahun 1959. Keputusan ini menunjukkan bahwa pabrik gula Mojo sudah berada dalam kendali pemerintah pusat. Tidak ditemukan bukti-bukti pasti tentang sistem produksi pabrik gula Mojo setelah dinasionalisasi begitu juga dengan sistem *manajemen* yang berjalan. Namun, operasional pabrik tetap berjalan seperti biasa dengan dibantu beberapa orang Eropa yang masih bekerja di dalam pabrik. Hal ini juga di sampaikan oleh narasumber yang mengungkapkan bahwa paska nasionalisasi pabrik tetap berjalan dan di bantu beberapa orang Belanda yang masih di Indonesia. Pengambilalihan pabrik gula Mojo terjadi dengan aman tanpa ada perlawanan oleh pihak Belanda.

Nasionalisasi pabrik gula Mojo Sragen baru dilaksanakan secara resmi oleh pemerintah pada tahun 1963. Hal ini tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) No.1 tahun 1963. Peraturan tersebut berisi tentang Pendirian Perusahaan

⁶ Suroso, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993) hlm. 83.

⁷ *Ibid*, hlm. 84.

⁸ Bondan Kanumoyoso, *op.cit.*, hlm. 63.

Perkebunan Gula Negara (PPGN).⁹ Pabrik-pabrik yang tercantum di dalamnya telah berdiri menjadi sebuah perusahaan milik Negara. Pabrik gula yang berdiri tersebut mendapatkan modal dari pemerintah pusat. Berdasarkan peraturan pemerintah pabrik gula Mojo berubah menjadi Perusahaan Perkebunan Gula Negara (PPGN) Mojo. PPGN dipimpin oleh direktur yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian dan Badan Pimpinan Umum (BPU). Adapun tugas dari BPU adalah menyelenggarakan pemasaran hasil-hasil perusahaan, mengatur pembiayaan perusahaan, menentukan kebijaksanaan umum dibidang pemburuhan bagi perusahaan serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan dengan perusahaan gula.

Pemerintahan yang setelah resmi mengambil perusahaan Belanda mulai memperhatikan pabrik-pabrik gula dengan memberikan modal. Permodalan yang di berikan pemerintah terhadap masing-masing pabrik berbeda-beda. PPGN Mojo menerima modal dari pemerinah sebesar Rp. 116.000.000.¹⁰ Perbedaan modal yang diberikan kepada pabrik diliat dari kapasitas hasil produksi sebelum nasionalisasi. Dalam Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1963 menyebutkan bahawa pabrik diharuskan melaporkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi kepada Menteri Pertanian dan Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan tahunan yang telah disampaikan kepada Menteri Pertanian akan digunakan oleh BPU-PPGN untuk menentukan harga produksi maupun harga jual gula eks-pabrik.

Setelah terjadinya nasionalisasi pada pabrik gula Mojo Sragen pada tahun 1958 industri gula mengalami keterpurukan. Keadaan tersebut dapat ditunjukkan dengan menurunnya hasil produksi, penurunan hasil produksi ini terjadi karena kurangnya tenaga ahli, alat-alat produksi yang digunakan dalam proses produksi. Selain itu juga terlihat dalam perkembangan produksi yang berjalan lamban. Hal ini disebabkan oleh situasi politik dalam negeri yang belum stabil pada masa itu.

⁹ Arsip ANRI, Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Gula Negara.

¹⁰ *Ibid.*

Ketidakstabilan politik yang terjadi didalam negeri mengakibatkan memuncaknya ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah-daerah yang memberotak.¹¹ Ketegangan ini sangat memerlukan pengeluaran yang cukup besar sehingga dapat menciptakan inflasi yang nantinya akan berdampak negatif terhadap kegiatan produksi. Selain itu juga semakin meningkatnya jumlah konsumsi gula di dalam negeri, yaitu pada tahun 1957 sebanyak 420 ribu ton, dan 724,8 ribu ton pada tahun 1967. Maka sejak tahun 1967 tingkat konsumsi gula dalam negeri sudah melebihi tingkat produksinya, serta juga terjadi penurunan terhadap produktivitas tebu dan pada saat yang bersamaan luas area perkebunan tebu juga tidak menunjukkan adanya peningkatan yang berarti. Turunya produktivitas terlihat dari rendahnya produksi gula per hektar (ton gula/ha). Ini berakibat langsung terhadap rendahnya pendapatan petani tebu.

Pabrik gula Mojo Sragen adalah salah satu perusahaan yang menjadi bagian ekonomi terpenting bagi Jawa Tengah pada umumnya. Sejak dinasionalisasi pada tahun 1958 pabrik ini telah dikuasai oleh pemerintah Indonesia . Dalam produksi yang dihasilkan oleh perusahaan hanya sebagian kecil yang dapat terpenuhi.

Tabel 1
Luas Area Perkebunan, Hasil Produksi, dan Jumlah Konsumsi Gula di Jawa Tengah

Tahun	Luas (Ribu Ha)	Produksi (Ribu Ton)	Konsumsi (Ribu Ton)
1959	77	855	723
1960	72	675	715
1961	73	626	590
1962	84	588	584
1963	83	650	368

Sumber: Data produksi pabrik gula Mojo.

Apabila kita lihat tabel diatas dapat kita ketahui jika perkembangan produksi gula mengalami penurunan setelah adanya nasionalisasi.

D. Dampak Nasionalisasi Terhadap Pabrik Gula Mojo

1. Dampak Terhadap *Managemen* Pabrik Gula

¹¹ Mubyarto, dan Daryanti, *Gula Kajian Sosial-Ekoomi*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1991), hlm. 15.

Nasionalisasi pabrik gula Mojo yang berada di Sragen secara sah dilaksanakan setelah adanya PP tentang nasionalisasi pabrik gula. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengambilalih pabrik-pabrik gula yang ada di Indonesia yang pada waktu itu milik orang Belanda. Pabrik gula Mojo adalah salah satu pabrik milik Belanda yang diambilalih. Pabrik gula Mojo termasuk pabrik gula yang telah diambilalih oleh pemerintah berdasarkan PP No. 1 tahun 1963.¹² Pabrik-pabrik yang telah berada dibawah kekuasaan pemerintah dipimpin langsung oleh orang pribumi sendiri.

Nasionalisasi terhadap perusahaan milik Belanda diikuti dengan pemulangan dan pengusiran warga negara Belanda. Disamping pengambilalihan perusahaan milik Belanda juga di serukan anti Belanda. Menteri kehakiman pada awal bulan Desember mengumumkan bahwa 50.000 warga negara diusir atau dipulangkan dalam tiga tahap. Kepulangan warga Belanda ke negaranya, memiliki tiga tahapan. Tahap pertama merupakan gelombang warga negara yang tidak memiliki pekerjaan, tahap kedua merupakan golongan menengah dan tahap ketiga merupakan gelombang untuk mereka yang merupakan tenaga ahli yang sukar dicari penggantinya.¹³

Pabrik gula yang dikendalikan oleh pemerintahan dan dikelola oleh masyarakat pribumi dapat berjalan seperti pada masa kepengurusan Belanda. Hal ini dikarenakan mesin-mesin dan alat-alat pengilingan gula tidak diambil oleh pemerintahan Belanda sehingga di pergunakan oleh Indonesia. Pada tahun 1967 pabrik gula Mojo ada penambahan alat yaitu ketel.¹⁴ Pada saat itu pembelian atau penambahan alat diperuntukan untuk menunjang pengolahan pabrik itu sendiri pembelian ketel didanai oleh pengelola pabrik yaitu Direksi.

¹² Arsip ANRI, Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Gula Negara.

¹³ Bondan Kanumoyoso, *op.cit.*, hlm. 65.

¹⁴ Ketel merupakan alat pemasak gula. Benda ini berfungsi untuk menghasilkan uap yang akan memanaskan bejana pemasak nira tebu yang kemudian akan di proses menjadi gula. (berdasarkan dari wawancara dengan narasumber).

Pabrik gula Mojo setelah berganti kepengurusan setelah nasionalisasi mengalami perubahan. Sebelum terjadi nasionalisasi pabrik gula Mojo dikelola oleh Mirandole Voute & CO (NV MCV) yang berkudukan di Semarang.¹⁵ Setelah terjadi nasionalisasi pabrik gula Mojo diambil oleh oleh pemerintahan Indonesia melalui Menteri Pertanian dan berubah menjadi perusahaan milik negara. Pabrik gula Mojo dalam perkembangannya berada dalam suatu manajemen yang di sebut dengan PT Perkebunan Negara (PTPN). Hal ini menyebabkan adanya suatu kerjasama dengan pabrik gula lainnya khususnya yang berada dalam satu manajemen PTPN IX.

Pabrik gula Mojo membagi karyawannya menjadi 3 kelompok yaitu: 1. karyawan pimpinan, 2. karyawan pelaksana, 3. karyawan musiman.¹⁶ Karyawan pimpinan terdiri dari admisnistratur, kepala tanaman, kepala pabrik, kepala pengolahan dan PUK. Masing-masing kepala membawahi karyawan pelaksana yang berada dalam tingkat 2 dalam struktur organisasi. Karyawan tingkat dua seperti mandor, bagian pengolahan tebu dll. Susunan terakhir karyawan dalam pabrik pabrik ialah karyawan musiman. Karyawan musiman ialah mereka yang bekerja dalam pabrik hanya masa giling dan tebang (panen), masa giling pabrik biasanya dimulai pada bulan Mei.

Menurut Pardi PG Mojo memiliki lahan sekitar 500 hektar dengan sewa tanah Rp. 10.000/hektar. Beliau juga berkata bahwa harga sewa tanah tiap daerah berbeda-beda tergantung letak lahan dan tingkat kesuburan lahan.¹⁷ Letak lahan yang strategis memudahkan dan menjadi pertimbangan pada saat masa penggilingan. Lahan yang berada di sekitar atau di dekat pabrik diangkut menggunakan gerobak dan dimasukkan ke dalam lori kemudian ditarik oleh lokomotif. Pabrik juga menggunakan angkutan lain seperti truk yang digunakan

¹⁵ Yunianta Muhammad Noor, *Laporan Kerja Praktek di Pabrik Gula Mojo Sragen PTP XV-XVI Surakarta*, (Yogyakarta : UGM, 1993), hlm. 3.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁷ Wawancara Pardi Pensiunan pabrik gula Mojo pada tanggal 15 Maret 2017, di Karanggunan, Tangkil, Sragen.

untuk mengangkut tebu yang berda di wilayah lain yang jauh dari pabrik itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan lahan, tahun 1963 dikembangkan sistem bagi hasil dengan dua pola yaitu pola peralihan dan pola bagi hasil.

Pada pola bagi hasil, petani dan PG masih-masing memperoleh bagian 60 dan 40 persen dari gula yang dihasilkan, petani juga mendapatkan gula 3 kuintal per hektar. Pola peralihan dimana petani menyerahkan lahan untuk ditanami tebu oleh PG dengan imbalan 25 persen gula yang dihasilkan. Walaupun secara teoritis sitem ini menarik, namun pada prakteknya tidak demikian karena tidak adanya transparansi dan kepastian produksi yang dihasilkan petani. Hal ini mengakibatkan lahan sewa pabrik gula mengalami penurunan meski tidak drastis.¹⁸

2. Dampak Terhadap Pekerja

Setelah nasionalisasi semua kegiatan pabrik dilaksanakan oleh orang-orang pribumi. Seluruh karyawan merupakan orang asli Indonesia yang dahulunya bekerja di pabrik gula pada masa pengurusan Belanda. Menurut beberapa narasumber, beberapa staff pabrik setelah nasionalisasi merupakan anggota dari TNI (Militer). Para TNI mulai masuk ke pengurusan pabrik pada tahun 1960an. Kehadiran para anggota militer karena ingin mengawasi perusahaan-perusahaan yang telah diambilalih pemerintah. Hal ini dilakukan agar perusahaan-perusahaan yang diambilalih tidak jatuh ke tangan PKI atau di kuasai PKI.

Perbedaan yang terlihat sebelum dan sesudah nasionalisasi ialah tingkat keahlian para pekerja di pabrik gula. Setelah di nasionalisasi, pabrik-pabrik kehilangan tenaga ahli yang mayoritas ialah orang-orang Belanda. Tenaga ahli meninggalkan Indonesia bersama adanya pemulangan warga negara Belanda secara besar-besaran oleh pemerintah pada tahun 1959 hingga awal tahun 1960an.¹⁹ Perbedaan cara kerja yang mencolok antara orang-orang Belanda

¹⁸ Sri Wahyuni, dkk, *Industri dan Perdagangan Gula di Indonesia: Pembelajaran dari Kebijakan Zaman Penjajahan-Sekarang*, (Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian), hlm. 139.

¹⁹ Retno Puji Lestari, *op.cit.*, hlm. 93.

dengan kaum pribumi ialah tingkat kedisiplinan. Para pekerja pribumi awalnya merupakan pekerja-pekerja yang berasal dari tingkat bawah dalam pabrik gula. Setelah nasionalisasi terjadi mereka kemudian ikut menjalankan dan menjadi bagian dari manajemen pabrik salah satunya Sukadi Sukiswo beliau bekerja di pabrik gula Mojo pada saat masih kepengurusan Belanda.

Kurangnya tenaga ahli *pasca* nasionalisasi di pabrik gula juga disampaikan oleh Sukadi Sukiswo. Kedisiplinan yang dimiliki oleh para pekerja jauh jika dibandingkan dengan kedisiplinan yang diterapkan pada masa kepemimpinan orang-orang Belanda. Karyawan *pasca* nasionalisasi tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Hal ini terus berlangsung pada era selanjutnya, bahkan sampai masa sekarang. Kedisiplinan merupakan hal yang penting dalam pengelolaan sebuah pabrik gula pada masa Belanda. Namun, hal tersebut hilang ketika pabrik gula jatuh ketangan pemerintahan Indonesia. Beberapa karyawan menyayangkan adanya nasionalisasi perusahaan milik Belanda. Para karyawan beranggapan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia dirasa kurang cukup untuk pengelolaan perusahaan besar seperti pabrik gula.

Kurangnya kedisiplinan kerja dapat kita lihat dari contoh perawatan mesin yang dimiliki oleh pabrik gula. pada saat terjadi kerusakan mesin giling oleh karyawan Belanda akan segera diperbaiki dengan kualitas barang yang sama dengan mesin yang rusak tersebut. Namun, ketika pabrik gula dikelola orang pemerintah Indonesia, kerusakan mesin di pabrik tidak segera diperbaiki dengan cepat. Perbaikan mesin giling yang ditunda-tunda dan tidak segera diperbaiki mengakibatkan terjadinya kerusakan yang makin parah. Kurangnya tenaga ahli yang mampu memperbaiki mesin giling pada masa itu diduga menjadi faktor utama yang menghambat perbaikan mesin yang rusak di pabrik gula.²⁰

Pasca nasionalisasi pabrik gula memang kekurangan tenaga ahli di berbagai sektor. Pada masa itu, pegawai dan tenaga ahli yang berkebangsaan Belanda telah dipulangkan ke negaranya. Pabrik hanya memiliki pegawai yang

²⁰ Wawancara dengan Sukadi Sukiswo dan Samsi pada tanggal 3 dan 13 Maret 2017. di Getas, Wonotolo, Gondang, Sragen dan Ngompalan, Tangkil, Sragen.

berasal dari pribumi sendiri dan pada umumnya belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola pabrik gula. Pemerintah Indonesia memberikan solusi yang jauh apa yang diharapkan oleh pabrik gula. Pemerintah justru melibatkan anggota TNI dalam industri gula. Seperti halnya yang telah disampaikan di atas bahwa masuknya anggota TNI ke dalam industri gula nasional merupakan dampak dari adanya upaya untuk menyelamatkan aset negara dari tangan PKI oleh sebab itu TNI masuk dalam struktur organisasi pabrik.

E. Kesimpulan

Kondisi pabrik gula Mojo Sragen sebelum nasionalisasi mengalami kemajuan dimana, pada tahun 1920-an terjadi ekspor besar-besaran secara nasional dan pabrik gula Mojo menjadi salah satu pabrik dari 179 yang melakukan ekspor gula tersebut. Selain itu, kemunculan pabrik gula di Sragen memberikan peluang bagi masyarakat pribumi, utamanya mereka yang tidak memiliki lahan untuk mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 1930an terjadi ketidak stabilan ekonomi dunia. Keadaan tersebut membuat produksi gula mulai melebihi kuantitas ekspor atau berkurangnya kualitas barang yang akan di ekspor. Hal ini menjadi awal bagi kemunduran industri gula pada masa kolonial Belanda dan pabrik gula Mojo Sragen juga mengalami penurunan dalam proses produksi.

Pada masa awal kemerdekaan keadaan ekonomi dan politik nasional yang tidak stabil berdampak terhadap industri gula di Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Belanda yang masih bersitegang terkait permasalahan Irian Barat berujung pada adanya upaya pemerintah mengambilalih perusahaan milik Belanda. Puncaknya terjadi pada akhir Desember 1957 ketika itu para buruh berhasil menduduki kantor perusahaan Belanda. Pengambilalihan perusahaan milik Belanda terus menyebar ke berbagai wilayah. Proses nasionalisasi pabrik gula di Jawa Tengah terjadi pada Desember 1958 dan berjalan tanpa adanya perlawanan. Upaya nasionalisasi pabrik gula Mojo telah dilakukan sejak awal tahun 1960 Namun, secara resmi pemerintah baru melakukan nasionalisasi pada tahun 1963 hal ini tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1963.

Setelah dilakukan tindakan nasionalisasi, pabrik gula Mojo berada di bawah pengawasan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN). Sebelum melebur

menjadi PPN Kesatuan, PPN terdiri dari dua yaitu PPN-Lama dan PPN-Baru. Dalam hal ini pabrik gula Mojo Sragen masuk dalam PPN-Baru dan menjadi bagian PPN Kesatuan Jawa Tengah V. Setelah diambilalih oleh pemerintah Indonesia pabrik gula Mojo di kelola oleh orang pribumi sendiri yang dahulunya menjadi buruh pada saat pengelolaan orang Belanda. Karyawan Belanda sudah tidak berada di pabrik karena kebanyakan mereka sudah kembali ke negaranya, bahkan jauh sebelum adanya tindakan nasionalisasi yang resmi oleh pemerintah.

Setelah terjadi nasionalisasi terdapat perbedaan mendasar yang dapat diamati, yang memiliki dampak dimana sistem *manajemen* pabrik dan etos kerja karyawan yang mulai penurunan karena kurangnya pengetahuan dan keahlian yang tidak sama seperti pada masa pengurusan Belanda. Dampak pertama terjadi pada *manajemen*, *manajemen* pabrik gula Mojo setelah nasionalisasi berada dalam naungan Perusahaan Perkebunan Negara yang dahulunya pabrik gula Mojo di kelola oleh *Marandole, Volle dan NV CML* yang berkedudukan di Semarang. Dampak yang kedua ialah etos kerja yang erat kaitannya dengan tenaga ahli yang dimiliki oleh pabrik gula setelah adanya tindakan nasionalisasi. Salah satunya pemulangan pegawai Belanda ke negaranya belum sempat mewariskan kemampuan yang cukup dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat pribumi.

DAFTAR PUSTAKA

- ANRI, Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Gula Negara.
- Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 185.
- Bondan Kanumayoso, *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda di Indonesia*, Jakarta : Sinar Harapan, 2001.
- Lina Farida, “Pabrik Gula Cempiring Kendal Pasca Nasionalisasi Tahun 1957-2008”, *Journal of Indonesian History*, Vol. 3, No. 1, tahun 2014.

Marwati Djoened Pusponagoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

Mubyarto, dan Daryanti, *Gula Kajian Sosial-Ekoomi*, Yogyakarta : Aditya Media, 1991.

Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Sragen dan Tim Peneliti Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret Surakarta, *Sejarah dan Hari Jadi Pemerintahan di Kabupaten Sragen*, Sragen: Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Sragen, 1987.

Sri Wahyuni, dkk, *Industri dan Perdagangan Gula di Indonesia: Pembelajaran dari Kebijakan Zaman Penjajahan-Sekarang*, Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Suroso, *Perekomian Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Yunianta Muhammad Noor, *Laporan Kerja Praktek di Pabrik Gula Mojo Sragen PTP XV-XVI Surakarta*, Yogyakarta : UGM, 1993.

Retno Puji Lestari, *Nasionalisasi Industri Gula di Madiun: Pabrik Gula Pagottan, Kanigoro dan Redjo Agung Baru Tahun 1950-1966, Skripsi, Yogyakarta: UNY, 2015.*

Narasumber:

Nama	Perkerjaan	Alamat
Pardi	Pensiunan PG Mojo	Karanggunan, Tangkil, Sragen
Samsi	Pensiunan PG Mojo	Ngompalan, Tangkil, Sragen
Sukadi Marto S	Pensiunan PG Mojo	Getas, Wonotolo, Gondang, Sragen

